



**KONTEKSTUALISASI ADOPSI KEBIJAKAN:
STUDI KASUS KEBIJAKAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KOREA
SELATAN**

**CONTEXTUALIZATION IN POLICY ADOPTION:
CASE STUDY OF COVID-19 CONTROL POLICY IN SOUTH KOREA**

Fajar Iswahyudi^a, Muhadjir Darwin^b, Agus Heruanto Hadna^b, dan Pande Made Kutanegara^b

^a Kandidat Doktoral Program Studi Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan,

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

^b Program Studi Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Jl. Tevesia, Bulaksumur-Yogyakarta

Email: fajarkawalan@gmail.com; muhadjir.darwin@gmail.com;

hadnaagus@yahoo.com; pkutanegara@yahoo.com;

Naskah diterima: 19 April 2020; revisi terakhir: 22 Juni 2020; disetujui 16 Juli 2020

How to Cite: Iswahyudi, Fajar., Darwin, Muhadjir., Hadna, Agus Heruanto., dan Kutanegara, Pande Made. (2020). Kontekstualisasi Adopsi Kebijakan: Studi Kasus Kebijakan Pengendalian Covid-19 di Korea Selatan. Jurnal Borneo Administrator, 16 (2), 117-136. <https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.682>

Abstract

South Korea is one of the countries that has successfully controlled Covid-19. The successes obtained by implementing policies, namely: tests, tracking, treatment, and social distancing. This success invited other countries to adopt policies. Policy adoption needs to be done by considering the policy context through three perspectives, namely rationality, organizational, and political. This research will reveal the context of South Korean policy from each perspective. The research method used to discuss the topic is document analysis. From a rationality perspective, the South Korean Government's policy has potent correlation both theoretically and empirically in controlling Covid-19. From an organizational perspective, the determination of South Korean government policy is limited by the rules apply in the organization. From a political perspective, the determination of the policy of the South Korean Government is limited by political pressure on policy makers. This condition is the reason the South Korean Government tends chooses policies for conducting tests, tracking, maintaining, and social distancing over other policies to control Covid-19. Although other policies have a better ability to control Covid-19, those who wish to adopt the policy of the South Korean Government can seek and take advantage of other policy alternatives. Especially, not experiencing organizational and political boundaries as happened in South Korea.

Keywords: Covid-19, South Korea Government, Policy, Control



Abstrak

Korea Selatan menjadi salah satu negara yang berhasil mengendalikan Covid-19. Keberhasilan tersebut diperoleh dengan melaksanakan empat kebijakan, yaitu: pelaksanaan tes, penelusuran, perawatan, dan menjaga jarak fisik. Keberhasilan ini mengundang negara lain untuk melakukan adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan perlu dilakukan dengan memperhatikan konteks kebijakan melalui tiga perspektif, yaitu rasionalitas, organisasional, dan politik. Penelitian ini akan mengungkap konteks kebijakan Korea Selatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan tersebut adalah analisis dokumen. Dari perspektif rasionalitas, kebijakan Pemerintah Korea Selatan tersebut memiliki korelasi yang kuat, baik secara teoritis maupun empiris dalam mengendalikan Covid-19. Dari perspektif organisasional, penentuan kebijakan pemerintah Korea Selatan dibatasi oleh aturan yang berlaku dalam organisasi. Dari perspektif politik, penentuan kebijakan Pemerintah Korea Selatan dibatasi oleh adanya tekanan politik kepada pembuat kebijakan. Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa Pemerintah Korea Selatan cenderung memilih kebijakan untuk pelaksanaan tes, penelusuran, perawatan, dan menjaga jarak fisik dibandingkan kebijakan lain guna mengendalikan Covid-19. Walaupun kebijakan lain tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengendalikan Covid-19. Untuk itu bagi para pihak yang ingin mengadopsi kebijakan Pemerintah Korea Selatan dapat mencari dan memanfaatkan alternatif kebijakan lain. Khususnya ketika tidak mengalami batasan organisasional dan politik seperti yang terjadi di Korea Selatan.

Kata Kunci: Covid-19, Korea Selatan, Kebijakan, Pengendalian

A. PENDAHULUAN

Coronavirus disease (Covid-19) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus corona baru ([WHO, 2020a](#)). Kasus Covid-19 secara global per tanggal 23 Maret 2020 tercatat sebanyak 294.110 kasus, 12,944 kematian, dan telah masuk di 187 negara ([WHO, 2020b](#)). *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan Covid-19 sebagai pandemi atau penyakit baru yang menyebar keseluruh dunia ([WHO, 2020c](#)). Tedros Adhanom Ghebreyesus (Direktur WHO) menegaskan setiap negara perlu melakukan seluruh langkah untuk mengendalikan Covid-19 ([Theguardian, 2020](#)). Untuk itu setiap negara didunia perlu melakukan segala upaya untuk mengendalikan Covid-19 ([Milne & Xie, 2020](#)).

Tidak banyak negara yang berhasil mengendalikan Covid-19, salah satu negara tersebut adalah Korea Selatan ([Moradi & Vaezi, 2020](#) ; [Oh et al., 2020](#)). Korea Selatan telah berhasil menekan jumlah pasien Covid-19 per hari dibawah 50 orang ([Moradi & Vaezi, 2020](#); [Worldometers, 2020b](#)). [Saw Swee Hock School of Public Health \(2020\)](#) menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari empat kebijakan utama Pemerintah Korea Selatan dalam mengintervensi Covid-19, yaitu pelaksanaan tes, penelusuran, perawatan, dan menjaga jarak fisik. Keberhasilan tersebut mengundang apresiasi positif dari berbagai kalangan, di antaranya adalah Sekretaris Jendral PBB dan Direktur WHO ([Channel News Asia, 2020](#); [Reuters, 2020](#)). Selain itu, keberhasilan tersebut juga membuat kebijakan Korea Selatan menjadi contoh alternatif kebijakan yang dapat diadopsi negara lain ([UNDP, 2020](#)).

Proses adopsi kebijakan perlu memperhatikan konteks dimana kebijakan tersebut dilakukan ([Anderson, 2003:38](#)). Konteks menjelaskan mengapa sebuah kebijakan dipilih di antara berbagai alternatif kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan kebijakan ([Kraft & Furlong, 2018:50](#)). Dengan memperhatikan konteks kebijakan, dapat meningkatkan akurasi



penyelesaian permasalahan dalam adopsi kebijakan ([Allison, 1969](#)). Berdasarkan penjelasan tersebut penelitian ini akan menjelaskan konteks kebijakan pengendalian Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan. Penjelasan ini diharapkan akan memberikan kejelasan mengapa kebijakan tersebut dipilih oleh Pemerintah Korea Selatan dalam mengendalikan Covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan membahas tentang konteks kebijakan pengendalian Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan. Untuk membahas permasalahan tersebut penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami perilaku seseorang atau sekelompok orang sebagai penjelas dari permasalahan manusia atau permasalahan sosial ([Creswell, 2009:4](#)).

Secara spesifik penelitian kualitatif akan dilakukan dengan pendekatan analisis dokumen. [Bowen \(2009\)](#) menjelaskan bahwa analisis dokumen adalah metode penelitian sistematis untuk mendapatkan arti dari sebuah dokumen. Analisis dokumen merupakan metode penelitian yang berfokus pada pencarian arti mendasar, tema, dan bentuk dari berbagai macam dokumen ([Wood, Sebar, & Vecchio, 2020](#)).

Analisis dokumen dilakukan dengan mendefinisikan sebuah dokumen untuk menggali arti, memahami, dan mengembangkan pengetahuan empiris. Dokumen berisi naskah atau tulisan dan gambar yang direkam tanpa intervensi dari peneliti. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, berita daring, *press releases*, dan analisa ahli.

Pada penelitian ini analisis dokumen dilakukan dengan merujuk pada metode yang disampaikan oleh [Wood, Sebar, & Vecchio \(2020\)](#). Metode yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) pengumpulan dokumen awal sesuai dengan relevansi tujuan penelian; (2) “*open coding*” memberikan kode yang menjadi identitas dari data berdasarkan topik yang dibahas; (3) “*theoretical coding*” mengumpulkan data ke dalam tema dan konsep; dan (4) membangun cerita atau narasi koheren yang mampu mengaitkan tema yang muncul dari data dan *literature*.

C. KERANGKA TEORI

Penelitian ini akan membahas konteks kebijakan Pemerintahan Korea Selatan dalam mengendalikan Covid-19. Konteks kebijakan dapat diartikan sebagai kondisi yang melingkupi sebuah kebijakan ([Nutt, 2000](#)). Konteks kebijakan memberikan pengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan, khususnya dalam tahapan adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan merupakan pengambilan keputusan dengan memilih alternatif kebijakan yang selanjutnya ditetapkan menjadi kebijakan untuk kemudian diimplementasikan ([Dunn, 2004:45](#); [Kee, 2017](#)).

Secara teoritis adopsi kebijakan perlu dilakukan secara rasional ([Eisenhardt & Zbaracki, 1992](#)). Tujuannya agar kebijakan yang diadopsi memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Dengan adanya rasionalitas dalam adopsi kebijakan, kemungkinan sebuah kebijakan akan menyelesaikan permasalahan semakin besar ([Allison, 1969](#)). Guna mewujudkan rasionalitas dalam adopsi kebijakan dibutuhkan informasi yang komprehensif mengenai sebuah kebijakan ([Eisenhardt & Zbaracki, 1992](#); [Lindblom, 1959](#)). Termasuk di dalamnya informasi mengenai konteks dimana kebijakan itu dibuat ([Anderson, 2003:38](#)).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menjelaskan konteks dari kebijakan yang perlu diperhatikan dalam adopsi kebijakan. [Henderson et al. \(2016\)](#) melakukan penelitian mengenai kawasan bebas asap rokok. Henderson menemukan bahwa adopsi kebijakan perlu



memperhatikan konteks politik dalam kebijakan. Mengingat kegagalan adopsi kebijakan disebabkan oleh adanya pengaruh aktor di luar pembuat kebijakan yang memiliki pengaruh terhadap sebuah kebijakan, di antaranya pemimpin tradisional dan dunia usaha. [Marier \(2017\)](#) melakukan analisis terhadap adopsi kebijakan pensiun Negara Swedia yang dilakukan oleh Pemerintah Norwegia. Marier menemukan bahwa adopsi kebijakan perlu memperhatikan konteks politik dimana kebijakan tersebut dibuat. [Everett, Chadwick, Cowan, & Kinkade \(2018\)](#) melakukan penelitian mengenai adopsi kebijakan pengendalian tembakau di negara bagian Missouri. Everett et. al menemukan bahwa adopsi kebijakan perlu memperhatikan konteks politik, mengingat sebuah kebijakan dipilih karena memiliki risiko politik yang rendah. [Rees \(2019\)](#) melakukan penelitian mengenai adopsi kebijakan bebas asap rokok di negara Israel. Rees menemukan bahwa adopsi kebijakan perlu memperhatikan aturan yang melingkupi kebijakan tersebut. [Trachtman \(2020\)](#) melakukan penelitian mengenai adopsi kebijakan iklim di negara-negara bagian di Amerika Serikat. Trachtman menemukan bahwa adopsi kebijakan perlu memperhatikan politik kebijakan atau interaksi antara pembuat kebijakan dan masyarakat, mengingat sebuah kebijakan karena adanya tekanan dari masyarakat kepada pembuat kebijakan.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa konteks kebijakan perlu diperhatikan dalam melakukan adopsi kebijakan. Penelitian sebelumnya juga menekankan pentingnya memperhatikan konteks politik. Namun demikian, pandangan ini perlu diperkaya dengan konteks selain politik. Pandangan dari beberapa konteks kebijakan dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif dibandingkan hanya dari satu konteks kebijakan ([Zahariadis, 2007:87](#)). Untuk itu, dibutuhkan pendekatan teoritis lain yang mampu menjelaskan beberapa konteks kebijakan.

Pada penelitian ini penjelasan mengenai konteks kebijakan dilakukan dengan menggunakan teori Allison yang dikembangkan pada tahun 1969. [Dunn \(2004\)](#); [Junior \(2017\)](#); [Peters & Pierre \(2006\)](#); dan [Vanhoonacker & Wangen \(2015\)](#) memandang bahwa teori Allison memiliki keunggulan dalam menjelaskan konteks kebijakan. Tiga perspektif dalam teori Allison dapat digunakan untuk saling melengkapi guna menjelaskan sebuah kebijakan. Atas keunggulan tersebut beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan teori Allison dalam konteks yang berbeda, misalnya: [Jachock \(2016\)](#) dalam konteks pengambilan keputusan penetapan harga beras di Thailand dan [Junior \(2017\)](#) dalam konteks formulasi kebijakan pendidikan di el Salvador.

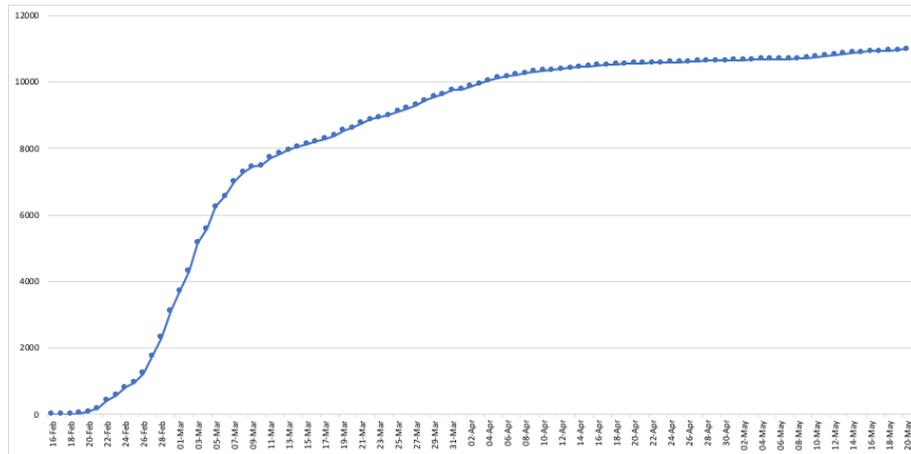
Teori Allison memberikan penjelasan konteks kebijakan melalui tiga perspektif utama, yaitu dari perspektif rasionalitas aktor, organisasional, dan politik. Perspektif rasionalitas menjelaskan sebuah kebijakan dari sisi rasionalitas pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan dianggap rasional ketika memilih kebijakan yang memberikan kemanfaatan yang besar dan biaya yang relatif rendah. Perspektif organisasional menjelaskan sebuah kebijakan dari sisi proses organisasi. Perspektif organisasional menganggap sebuah kebijakan merupakan hasil dari proses organisasi. Proses tersebut dipengaruhi oleh aturan-aturan yang ada di dalam organisasi yang pada akhirnya memengaruhi bagaimana organisasi memberikan respons kebijakan. Perspektif politik menjelaskan sebuah kebijakan dari interaksi para aktor pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan dianggap bukan aktor tunggal yang menentukan seluruh kebijakan, melainkan terdapat aktor lain yang ikut memengaruhi pembuatan kebijakan.



D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Korea Selatan

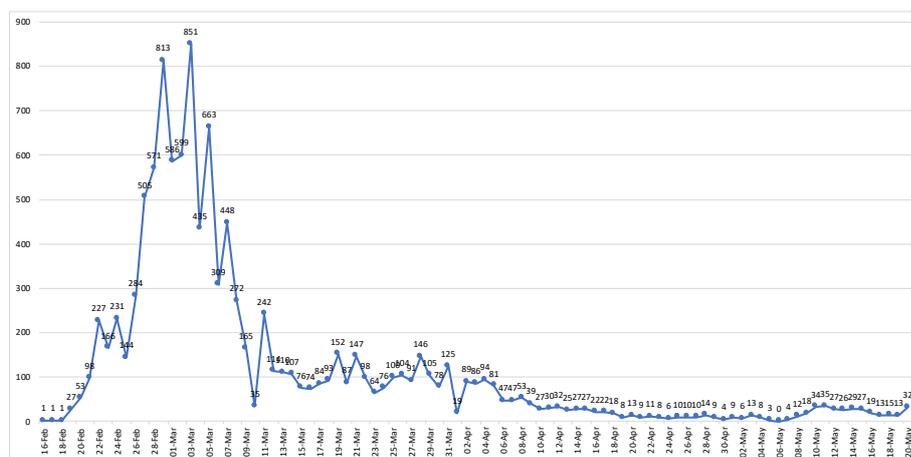
Sama seperti negara lain, Korea Selatan juga terpapar Covid-19. Kasus pertama ditemukan di Korea Selatan pada 16 Februari 2020. Setelah itu jumlah pasien Covid-19 meningkat dengan drastis. Pada tanggal 2 Maret 2020, Korea Selatan menjadi negara dengan jumlah kasus terbesar kedua setelah Tiongkok dengan jumlah penderita Covid-19 sejumlah 4.307 orang ([Korean Society of Infectious Diseases et al., 2020](#); [Worldometers.info, 2020b](#)). Per tanggal 20 Mei 2020 jumlah penderita Covid-19 sejumlah 783.708 orang.



Gambar 1.

Jumlah Pasien Covid-19 Hingga 20 Mei 2020 (Sumber: [Worldometers.info, 2020b](#))

Pada sisi lain, penambahan jumlah pasien Covid-19 per hari yang cenderung menurun menunjukkan bahwa Pemerintah Korea Selatan telah berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19. Pada awalnya penambahan pasien Covid-19 meningkat secara drastis dan mencapai puncaknya pada tanggal 3 Maret 2020 dengan penambahan pasien per hari 851 orang. Setelah itu penambahan berangsur-angsur menurun hingga mulai tanggal 4 April 2020 jumlah penambahan pasien per hari berada di bawah 50 orang. Pada grafik 2 digambarkan bagaimana penurunan kasus Covid-19 terjadi.



Gambar 2.

Jumlah Perkembangan Kasus Per Hari (Sumber: [Worldometers.info, 2020b](#))



Menghadapi Covid-19, Pemerintah Korea Selatan mengimplementasikan *The Infectious Disease Control and Prevention Act* (Peraturan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Infeksi) Act No. 14286 tanggal 2 Desember 2016 atau disingkat dengan IDCAA. IDCAA bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat Korea Selatan dengan mencegah terjadinya penyebaran penyakit infeksi berbahaya. IDCAA menjadi panduan Pemerintah Korea Selatan dan segenap pihak dalam menghadapi penyakit infeksi yang terjadi di Korea Selatan termasuk Covid-19 ([M. Park, 2017](#)).

Terdapat beberapa wujud kebijakan pengendalian penyakit infeksi yang diatur dalam IDCAA, yaitu tes secara masal, penelusuran, perawatan, dan menjaga jarak fisik. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh [Saw Swee Hock School of Public Health \(2020\)](#) memberikan sumbangan yang signifikan dalam mengendalikan Covid-19 di Korea Selatan. Berikut penjelasan dari tiap-tiap pendekatan tersebut.

Tes secara masal. Tes dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang telah terpapar Covid-19. Berbeda dengan negara lainnya, Pemerintah Korea Selatan melakukan tes secara masif ([Preiser, Zyl, & Dramowski, 2020](#)). Menurut [Worldometers \(2020\)](#) per 9 Maret 2020, Korea Selatan termasuk tiga besar negara-negara yang telah melakukan tes besar-besaran bagi warganya. Pada peringkat pertama Bahrain, 4.910 per 1.000.000 penduduk. Peringkat kedua, Korea Selatan 4.099 per 1.000.000 penduduk. Pada peringkat ketiga, Hong Kong 1.005 per 1.000.000 penduduk.

Pelaksanaan tes secara besar-besaran ini didukung dengan pemberian kewenangan kepada berbagai laboratorium di Korea Selatan. Pada awalnya pelaksanaan tes dilakukan oleh KCDC. Seiring dengan berjalannya waktu dan peningkatan kebutuhan, Pemerintah Korea Selatan, pada tanggal 24 Januari 2020 memberikan rekomendasi pelaksanaan tes kepada 17 laboratorium dan pada tanggal 7 Februari 2020 kepada 46 laboratorium ([Korean Society of Infectious Diseases et al., 2020](#)).

Selain itu, Pemerintah Korea Selatan melakukan terobosan dengan melakukan tes dengan cara *drivethrough* ([UNDP, 2020](#)). Melalui cara ini masyarakat cukup mendatangi stasiun tes *drivethrough* menggunakan kendaraan. Petugas akan menghampiri untuk memeriksa gejala dan mengambil spesimen tanpa mengharuskan masyarakat turun dari kendaraan. Melalui pendekatan ini pengambilan tes dapat dilakukan dengan efisien dan mencegah penularan di antara masyarakat dengan petugas kesehatan. Per tanggal 19 Maret 2020, Pemerintah Korea Selatan telah membangun 85 stasiun *drivethrough* di berbagai wilayah Korea Selatan.

Penelusuran. Penelusuran merupakan salah satu tindak lanjut dari hasil tes. Penelusuran dilakukan untuk beberapa tujuan, yaitu menyelidiki perilaku pasien Covid-19 sebelum atau setelah terinfeksi; mengidentifikasi para pihak yang pernah bersentuhan langsung maupun berdekatan dengan pasien Covid-19; dan mengidentifikasi tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh pasien Covid-19 ([Cho, 2020](#)). Untuk melakukan penelusuran Pemerintah Korea Selatan melakukan wawancara kepada pasien Covid-19, penelusuran catatan penggunaan fasilitas medis, pemanfaatan *Global Positioning System* (GPS), identifikasi transaksi kartu kredit, dan pemanfaatan *Closed Circuit Television* (CCTV) yang tersebar di berbagai wilayah di Korea Selatan ([Cho, 2020](#)).

Hasil dari penelusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan adalah pemetaan sebaran pasien Covid-19 di wilayah Korea Selatan. Memanfaatkan peta sebaran pasien Covid-19, Pemerintah Korea Selatan bekerja sama dengan penyedia jejaring seluler dan perusahaan manufaktur telepon seluler untuk mengembangkan sistem informasi guna mengendalikan Covid-19 ([UNDP, 2020](#)). Sistem informasi ini di antaranya adalah layanan



pesan singkat tentang Covid-19 dan dua aplikasi dalam telpon pintar (*Self-Quarantine Safety Protection* dan *The Corona 100m*).

Pesan singkat dimanfaatkan oleh Pemerintah Korea Selatan untuk mengirimkan pesan berisi segala informasi mengenai Covid-19. Informasi yang disampaikan dalam pesan singkat di antaranya adalah hasil survey detail kasus terbaru, dan lokasi dan waktu saat pasien Covid-19 pernah berkunjung. Melalui pesan ini diharapkan masyarakat Korea Selatan menjadi semakin waspada dengan lingkungan sekitarnya (UNDP, 2020). Aplikasi *Self-Quarantine Safety Protection* berfungsi untuk memberikan informasi mengenai risiko seseorang terpapar Covid-19 dan media komunikasi selama menjalani karantina mandiri. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat mengetahui apakah dirinya pernah bersentuhan atau berdekatan dengan pasien Covid-19 (Hamilton, 2020). Bagi mereka yang memiliki riwayat bersentuhan dan berdekatan dengan pasien Covid-19 diwajibkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari dan melaporkan perkembangan kesehatan badannya. Melalui aplikasi ini masyarakat juga dimudahkan untuk melaporkan perkembangan kesehatannya sekaligus keberadaannya kepada Pemerintah Korea Selatan (Kim, 2020). Aplikasi *The Corona 100m* (Co100) mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya pasien Covid-19 dalam radius 100m. Aplikasi ini digunakan untuk menghindari masyarakat dari berhubungan langsung dengan pasien Covid-19 (Wray, 2020). Selain itu, melalui aplikasi ini masyarakat dapat membantu Pemerintah Korea Selatan mengawasi pergerakan dari pasien Covid-19.

Perawatan. Bagi masyarakat yang telah terpapar Covid-19, Pemerintah Korea Selatan memberikan perawatan yang maksimal. Pemerintah Korea Selatan menciptakan Sistem Manajemen Pasien (The Government of the Republic of Korea, 2020). Terdapat lima elemen penting dalam Sistem Manajemen Pasien.

Pertama, memberikan perawatan berdasarkan tingkat keparahannya. Tingkat keparahan pasien Covid-19 dibagi menjadi empat tingkat, yaitu ringan, moderat, parah, dan sangat parah. Bagi Pasien yang memiliki gejala moderat, parah, dan sangat parah akan dirawat di rumah sakit penyakit infeksi nasional dan rumah sakit lain yang menjadi rujukan pemerintah. Bagi Pasien dengan gejala ringan akan dilakukan isolasi di rumah dan dilakukan perawatan oleh pusat kesehatan di tingkat lokal. Pasien yang melakukan isolasi di rumah akan dikunjungi oleh staf kesehatan dua kali sehari.

Kedua, memastikan ketersediaan tempat tidur perawatan di Rumah Sakit. Pemerintah Korea Selatan memastikan ketersediaan tempat tidur bagi pasien dengan tingkat keparahan moderat, parah, dan sangat parah. Pemerintah Korea Selatan menyediakan 60 rumah sakit khusus bagi pasien Covid-19. Pemerintah Korea Selatan terus menambah tempat tidur untuk menjaga ketersediaan tempat tidur.

Ketiga, menyediakan tenaga kesehatan dan alat pelindung diri yang mencukupi. Pemerintah Korea Selatan merekrut tenaga medis ahli melalui berbagai metode dan saluran. Melindungi tenaga medis dengan isolasi mandiri, pelayanan pengendalian infeksi, dan kompensasi keuangan. Pemerintah Korea Selatan juga mendistribusikan peralatan perlindungan diri kepada pemerintah daerah dan lembaga kesehatan yang membutuhkan.

Keempat, mengelola persediaan kebutuhan medis dan mengembangkan vaksin dan terapi. Pemerintah Korea Selatan menerapkan manajemen persediaan kebutuhan medis dan saling membagi informasi kepada distributor. Tujuannya para distributor dapat saling mencukupi ketersediaan kebutuhan medis. Pemerintah Korea Selatan juga terus mengembangkan vaksin dan terapi melalui kolaborasi dengan sektor swasta.



Kelima, penyatuan lembaga kesehatan. Kebijakan ini didasari dengan keinginan Pemerintah Korea Selatan untuk memastikan adanya aksesibilitas dan keamanan bagi pasien-pasien bukan Covid-19. Untuk itu, Pemerintah Korea Selatan memisahkan antara pasien Covid-19 dan bukan pasien Covid-19. Pada 27 Maret 2020 Pemerintah Korea Selatan sudah mendesain 337 rumah sakit perlindungan dari Covid-19. Pemerintah telah memberikan izin bagi pasien nonpernafasan untuk menerima layanan konseling dan resep melalui telepon ([The Government of the Republic of Korea, 2020](#)).

Menjaga Jarak Fisik. Menurut Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan (*Ministry of Health and Welfare*) *social distancing* atau menjaga jarak fisik merupakan tindakan untuk mengurangi hubungan langsung atau berdekatan di antara masyarakat untuk menghindari penyebaran virus. Pemerintah Korea Selatan mengimplementasikan kebijakan untuk menjaga jarak fisik mulai tanggal 4 Februari 2020 atau sekitar 2 minggu sejak kasus pertama terjadi di Korea Selatan ([The Government of the Republic of Korea, 2020](#)). Pemerintah Korea Selatan mengimplementasikannya dengan langkah penutupan sekolah, bekerja dari rumah, dan melarang kegiatan yang mengumpulkan massa ([MOHW, 2020](#)). Kebijakan menjaga jarak didukung dengan adanya kebijakan keharusan untuk menggunakan masker, penyediaan kamera penangkap suhu tubuh di pintu masuk bangunan penting, dan penyediaan cairan pembersih tangan di wilayah-wilayah yang sering digunakan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Korea Selatan perlu dilihat dari perspektif rasionalitas, organisasional, dan politik guna memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai konteks kebijakan, sehingga meningkatkan akurasi adopsi kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan kebijakan. Berikut ini adalah pandangan dari masing-masing perspektif dimaksud.

Perspektif Rasional

Covid-19 memberikan permasalahan kesehatan yang serius kepada Pemerintah Korea Selatan karena telah menjangkiti 9.450 orang dan masih terus bertambah. Covid-19 memiliki efek samping yang tidak kalah serius, seperti efek ekonomi, sosial, dan lainnya. Lebih dari itu, sampai penelitian ini dilakukan belum ditemukan vaksin atau obat guna menyembuhkan Covid-19. Untuk itu, kebijakan yang perlu dilakukan adalah mengendalikan penyebaran Covid-19 dengan menekan angka penularan seminimal mungkin ([R. M. Anderson, Heesterbeek, Klinkenberg, & Hollingsworth, 2020](#)).

Pemerintah Korea Selatan kemudian dihadapkan pada beberapa pilihan kebijakan pengendalian Covid-19. [Anderson et al. \(2020\)](#) menyampaikan beberapa kebijakan yang dapat ditempuh, yaitu melakukan karantina, isolasi, menjaga jarak sosial, dan penelusuran. [He \(2020\)](#) kemudian menyampaikan beberapa kebijakan untuk mengendalikan Covid-19, yaitu isolasi, penelusuran, penutupan wilayah epidemi, pengendalian lalu lintas, pelarangan perjalanan dari dan ke wilayah epidemi, pemakaian masker, penutupan sekolah, dan bekerja dari rumah. [Wilder-smith, Chiew, & Lee \(2020\)](#) juga menyampaikan beberapa kebijakan untuk mengendalikan Covid-19, yaitu isolasi, karantina, dan penutupan wilayah. [Huh, Shin, & Peck \(2020\)](#) menyampaikan beberapa kebijakan untuk mengendalikan Covid-19, yaitu perawatan (pemberian obat, isolasi, karantina), menjaga jarak sosial, tes, penelusuran, dan mempraktekkan gaya hidup sehat. [Shim et al. \(2020\)](#) menyarankan Pemerintah Korea Selatan perlu segera menerapkan tes dengan massif, penelusuran, dan melakukan isolasi dengan cepat. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, Pemerintah Korea Selatan tidak melakukan seluruhnya. Pemerintah Korea Selatan hanya melakukan tes, penelusuran, perawatan, dan menjaga jarak fisik.



Tabel 1.
Pelaksanaan Rekomendasi Para Peneliti di Korea Selatan

No	Kebijakan Pemerintah Korsel	Rekomendasi Kebijakan				
		Anderson et al. (2020)	He (2020)	Wilder-smith et al. (2020)	Huh, Shin, & Peck (2020)	Shim et al. (2020)
1	Tes secara massif	-	-	-	x	x
2	Penelusuran	x	x	-	x	x
3	Perawatan	x	x	x	x	x
4	Menjaga Jarak Fisik	x	x	x	x	-

Keterangan: x = Diusulkan; - = Tidak Diusulkan

Sumber: *Data sekunder diolah*

Jika dianalisis secara lebih mendalam, pilihan kebijakan Pemerintah Korea Selatan memiliki korelasi yang kuat dalam mengendalikan Covid-19. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Korea Selatan tersebut memengaruhi penularan Covid-19. Berikut penjelasan tiap-tiap kebijakan tersebut.

[Lee, Chiew, & Khong \(2020\)](#) menemukan bahwa tes secara massif mampu membantu mengendalikan wabah Covid-19 di Singapura. Tes digunakan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin kasus yang terjadi. Identifikasi kasus ini dibutuhkan sebagai bahan untuk penelusuran. Tanpa adanya tes yang dilakukan secara besar-besaran, penelusuran akan sulit dilakukan, dan akibatnya wabah Covid-19 sulit dikendalikan. Penelitian yang dilakukan oleh [C. J. Wang, Ng, & Brook \(2020\)](#) menyatakan bahwa tes secara massif membantu mengendalikan Covid-19 di Taiwan. Pemerintah Taiwan telah belajar dari wabah SARS yang terjadi pada tahun 2003 yang menyatakan pentingnya tes secara massif guna mengetahui penyebaran penyakit infeksi.

[Lee, Chiew, & Khong \(2020\)](#) menemukan bahwa penelusuran yang membantu mengendalikan wabah Covid-19 di Singapura. Tes digunakan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin kasus yang terjadi. Hasil tes ini digunakan untuk menelusuri kontak yang dilakukan oleh pasien Covid-19 selama 14 hari ke belakang terhitung sejak gejala mulai timbul. Hasil penelusuran ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan isolasi seseorang yang pernah kontak langsung atau berdekatan dengan pasien Covid-19. [Hellewell et al. \(2020\)](#) juga menyatakan bahwa penelusuran mampu membantu mengurangi penyebaran Covid-19. Kesimpulan ini diambil melalui pemodelan penyebaran virus SARS yang terjadi sebelumnya. Mengingat karakteristik penyebaran Covid-19 dengan SARS memiliki kemiripan, pemodelan ini kemudian dikembangkan untuk memprediksi penyebaran Covid-19. Dari hasil pemodelan tersebut ditemukan bahwa Covid-19 dapat dikendalikan dengan penelusuran dan isolasi karena mampu memberikan jeda penyebaran dan memotong mata rantai penularan.

[Wang et al. \(2020\)](#) menemukan bahwa karantina dapat mengendalikan Covid-19 yang terjadi di Wuhan, Tiongkok. Pemerintah Wuhan melakukan karantina untuk mencegah pasien yang terinfeksi berkeliaran dan menularkan Covid-19 ke orang lain. Karantina yang terjadi di Wuhan menjadi karantina terbesar dalam sejarah umat manusia. [Lee et al. \(2020\)](#) menemukan bahwa isolasi dapat mengendalikan wabah Covid-19 di Singapura. Isolasi bagi seseorang yang telah kontak langsung atau berdekatan dengan pasien Covid-19 akan membantu menangkal penyebaran Covid-19, mengingat penularan Covid-19 dapat terjadi, baik melalui kontak langsung maupun berdekatan dengan pasien Covid-19. [Hellewell et al. \(2020\)](#) juga menyatakan bahwa isolasi mampu membantu mengurangi penyebaran Covid-19. Kesimpulan ini dibuat melalui pemodelan penyebaran virus SARS yang terjadi sebelumnya. Mengingat karakteristik penyebaran Covid-19 dengan SARS memiliki



kemiripan, pemodelan ini kemudian dikembangkan untuk memprediksi penyebaran Covid-19. Dari hasil pemodelan tersebut ditemukan bahwa Covid-19 dapat dikendalikan dengan penelusuran dan isolasi karena mampu memberikan jeda penyebaran dan memotong mata rantai penularan.

[Lau et al. \(2020\)](#) melakukan penelitian mengenai dampak praktek menjaga jarak fisik di Wuhan untuk menghadapi wabah Covid-19. Pemerintah Tiongkok juga memberlakukan karantina di rumah; memberlakukan menjaga jarak fisik; membatalkan seluruh kegiatan dan pertemuan; menutup tempat pertemuan publik termasuk didalamnya sekolah dan universitas. [Lau et al. \(2020\)](#) menemukan bahwa kebijakan ini memberikan dampak yang positif. Terdapat penurunan rata-rata perkembangan kasus yang terjadi di Wuhan.

Terdapat konsekuensi yang relatif besar dari pengambilan kebijakan ini. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Ekonomi dan Keuangan sampai dengan sekarang, Pemerintah Korea Selatan telah mengucurkan 11,7 triliun won, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2.
Kebutuhan Pendanaan Kebijakan Pengendalian Covid-19 di Korea Selatan

No	Uraian	Alokasi
1	Pengendalian	
	a) Pencegahan dan perawatan	80 Miliar Won
	b) Lembaga kesehatan yang terdampak wabah	1,7 Triliun Won
	c) Dukungan kepada pihak yang dikarantina dan pemberian pinjaman ke lembaga kesehatan	500 Miliar Won
	Total	2,3 Triliun Won
2	Bantuan kepada pedagang dan perusahaan kecil	
	a) Dukungan darurat untuk operasional bisnis (melalui pinjaman dan garansi)	1,7 Triliun Won
	b) Dukungan kepada pedagang kecil (termasuk dukungan pembayaran gaji)	610 Miliar Won
	c) Dorongan kepada bisnis kecil yang terdampak (termasuk pengusaha di pasar tradisional)	140 Miliar Won
	Total	2,4 Triliun Won
3	Peningkatan Konsumsi dan Dukungan bagi pencari kerja	
	a) Peningkatan konsumsi dan dukungan bagi pencari kerja (pemberian diskon)	2,4 Triliun Won
	b) Dukungan pencari kerja (pemberian gaji)	630 Miliar Won
	Total	3 Triliun Won
4	Bantuan Ekonomi Lokal Terdampak	
	a) Membantu industri lokal terdampak	130 Miliar Won
	b) Peningkatan ekonomi lokal	240 Miliar Won
	c) Bantuan pemerintah local melalui hibah dan subsidi	290 Miliar Won
	Total	0,8 Triliun Won
5	Bantuan kepada Kota Daegu dan Provinsi Kyeongsang	
	a) Pencegahan dan perawatan	10 Miliar won
	b) Bantuan kedaruratan untuk pedagang kecil dan perusahaan kecil terdampak	150 Miliar won
	c) Peningkatan ekonomi local	100 Miliar Won
	Total	350 Miliar Won
	TOTAL KESELURUHAN	11,7 Triliun Won

Sumber: Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan (*The Ministry of Economic and Finance*) (2020)

Perspektif rasional melihat kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah Korea Selatan memiliki alasan yang rasional. Pemerintah Korea Selatan dianggap sebagai aktor yang rasional dalam pembuatan kebijakan. Rasionalitas aktor kebijakan ditunjukkan dengan pemilihan alternatif kebijakan yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan dan membutuhkan investasi sumber daya yang relatif rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut



dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengendalian Covid-19 tersebut memiliki alasan yang rasional. Keempat kebijakan memiliki alasan teoritis dan empiris dapat mengendalikan penyakit infeksi. Walaupun berdampak pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Korea Selatan, hal ini tidak sebanding dari nyawa warga Korea Selatan yang berhasil diselamatkan dari wabah Covid-19 ini. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allison bahwa sebuah kebijakan didesain secara rasional. Dalam artian alternatif kebijakan yang memberikan kemanfaatan paling besar dan jika memungkinkan biaya dapat diturunkan tanpa mengurangi kemanfaatan cenderung akan dipilih.

Namun demikian, masih terdapat pertanyaan mengapa pemerintah Korea Selatan tidak melakukan pelarangan perjalanan dari dan menuju wilayah episentrum Covid-19. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah awal perlindungan wilayah dari wabah yang menular antar manusia. Kebijakan ini diharapkan menghindarkan dari masuknya Covid-19 ke wilayah Korea Selatan ([Al-Tawfiq, Zumla, & Memish, 2014](#); [Chinazzi et al., 2020](#)). Untuk itu perlu analisis lebih lanjut mengapa Pemerintah Korea Selatan lebih memilih kebijakan korektif dibandingkan preventif dengan melakukan pelarangan perjalanan dari dan menuju wilayah episentrum Covid-19. Berikut penjelasan dari perspektif organisasional dan politik.

Perspektif Organisasional

Sebelum Covid-19 masuk ke dalam wilayah teritorial Korea Selatan, penyakit infeksi *Savere Acute Respiratory Syndrome (SARS)* dan *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* telah terlebih dahulu masuk ke wilayah Korea Selatan. Kedua penyakit tersebut memakan korban yang tidak sedikit dan menjadi pelajaran serius bagi Pemerintah Korea Selatan. Melalui pengalaman SARS dan MERS tersebut, Pemerintah Korea Selatan serius memperbaiki dan mempersiapkan diri guna menghadapi wabah lain yang sewaktu-waktu menghampiri Korea Selatan ([H. Y. Lee, Oh, Park, Chu, & Son, 2013](#)).

Langkah strategis Pemerintah Korea Selatan diwujudkan dengan memperbaiki IDCAA sebagai panduan dalam menghadapi penyakit infeksi. Pascawabah MERS yang terjadi pada tahun 2015, Pemerintah Korea Selatan telah melakukan empat kali perubahan, yaitu pada tanggal 15 Juli 2006, 11 Agustus 2015, 29 Desember 2015, dan 2 Desember 2016. Perubahan tersebut diwujudkan dengan memperluas cakupan penyakit infeksi sebagai persiapan adanya penyakit infeksi baru yang belum dikenal sebelumnya; pembagian tugas pengendalian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; keterbukaan informasi mengenai penyakit menular; mendorong keterlibatan aktif masyarakat untuk membantu mengendalikan penyakit menular; mekanisme pelaporan penyakit menular secara *bottom up*; penguatan kelembagaan *Korea Center Disease Control (KCDC)*; perbaikan langkah pengendalian penyakit infeksi; dan lainnya. Perubahan IDCAA tersebut bertujuan untuk mencegah risiko yang dapat dihindari terjadi, mendorong adanya pendeteksian awal terhadap seluruh risiko, dan memberikan respons secara cepat dan efektif. IDCAA juga menjadi dasar untuk melakukan pengendalian sesuai dengan bukti ilmiah, pemberitahuan dan melaporkan penyakit infeksi, memenuhi kebutuhan rumah sakit yang menjadi rujukan, memenuhi kebutuhan obat-obatan, dan memberikan dukungan keuangan untuk kembali ke sediakala ([M. Park, 2017](#)).

Pada saat Covid-19 mengemuka, Pemerintah Korea Selatan memanfaatkan IDCAA sebagai panduan pengendalian Covid-19. Merujuk pada IDCAA artikel ke-47 kewenangan pengendalian penyakit infeksi dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan dan didelegasikan kepada KCDC. KCDC bertanggung jawab kepada Presiden Korea Selatan melalui Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Untuk itu, KCDC menjadi organisasi yang berwenang dalam pengendalian wabah Covid-19. KCDC sendiri didirikan pada tahun



2007 dengan tujuan untuk merespons krisis kesehatan karena adanya penyakit menular yang muncul. Untuk mengendalikan Covid-19, KCDC berpedoman pada IDCAA dan merujuk pada panduan pengendalian Covid-19 oleh *World Health Organization* (WHO).

Menurut IDCAA, guna mengendalikan penyakit infeksi seperti Covid-19, KCDC diharuskan melakukan beberapa pendekatan di antaranya adalah melakukan tes, penelusuran, perawatan, dan menjaga jarak fisik. *Tes secara massif* pelaksanaannya telah diatur Artikel 6 (hak dan kewajiban masyarakat) paragraph (3). *Penelusuran* pelaksanaannya telah diatur dalam artikel 4 (tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) paragraph (2); Artikel 6 (hak dan kewajiban masyarakat) paragraf (2); Artikel 17 paragraf (1) dan (3). *Perawatan* pelaksanaannya telah diatur pada artikel 4 (tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) pada paragraf (1) dan (2). *Menjaga jarak fisik* telah diatur pada Artikel 47 (pengendalian epidemik dalam mencegah penyakit infeksi) dan Artikel 49 (langkah-langkah pencegahan penyakit infeksi) paragraph (1).

Menurut WHO pengendalian Covid-19 berpedoman pada “*Critical Preparedness, Readiness, and Response Action for Covid-19*”. Menurut dokumen tersebut bagi negara dengan pola penyebaran Covid-19 terkluster¹ seperti Korea Selatan, perlu memberikan prioritas kebijakan dalam bentuk: intensifikasi pencarian kasus melalui tes secara massif; menelusuri dan mengawasi kontak; melakukan karantina kontak dan melakukan isolasi kasus; dan menjaga jarak fisik. Keempat kebijakan Pemerintah Korea Selatan itu, telah sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh WHO.

Sementara itu, kebijakan preventif seperti pelarangan perjalanan dari dan menuju wilayah episentrum Covid-19 tidak diatur dalam IDCAA dan juga pedoman WHO. Di sisi IDCAA dan pedoman WHO dapat membantu memberikan rujukan dalam pengendalian Covid-19. Di sisi lainnya, kedua aturan tersebut memberikan batasan dalam pengendalian Covid-19. Batasan ini membuat Pemerintah Korea Selatan tidak merasa penting melakukan kebijakan lain di luar kedua aturan tersebut, seperti melakukan pelarangan perjalanan dari dan menuju wilayah episentrum Covid-19.

Perspektif Politik

Kebijakan pengendalian Covid-19 oleh Pemerintah Korea Selatan perlu dilihat dari sisi politik, mengingat Pemerintah Korea Selatan bukanlah aktor tunggal dalam pembuatan keputusan. Terdapat aktor lain yang ikut mempengaruhi pembuatan kebijakan pengendalian Covid-19. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana interaksi yang terjadi di antara aktor tersebut dalam pembuatan kebijakan pengendalian Covid-19.

Interaksi di antara para aktor secara makro dapat dilihat dari bentuk negara Korea Selatan. Menurut konstitusi, Korea Selatan berbentuk republik. Untuk itu, kebijakan dipengaruhi tiga aktor utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif dipimpin oleh Presiden. Presiden dipilih langsung oleh masyarakat Korea Selatan lima tahun sekali dengan satu kali masa jabatan. Mulai 10 Mei 2017, Moon Jae-in menduduki jabatan Presiden Korea Selatan untuk periode 2017—2022. Presiden Moon berasal dari Partai Demokratis Korea. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, Presiden dibantu oleh Perdana Menteri, 23 Kementrian, 17 Pemerintah Daerah, 2 Dewan, 4 Kantor, dan 6 Komite (Koreanculture.org, 2020).

Lembaga legislatif Korea Selatan disebut sebagai Majelis Nasional (*National Assembly*). Majelis nasional memiliki 300 anggota tetap yang dipilih untuk masa jabatan

¹ Negara terkluster ditunjukkan dengan adanya keterkaitan langsung diantara pasien Covid-19 (The Government of the Republic of Korea, 2020; WHO, 2020b)



empat tahun. Dari 300 anggota majelis nasional, 246 anggota dipilih dalam pemilihan lokal atau daerah dan 54 anggota dipilih oleh partai politik dengan pendekatan proporsional ([Korean Culture, 2020](#)).

Sistim politik di Korea Selatan mengenali adanya partai penguasa dan partai oposisi. Per Juni 2016 partai penguasa di Korea Selatan adalah Partai Demokratis Korea (*Democratic Party of Korea*) mengingat jumlah anggota yang menduduki majelis nasional paling besar, yaitu 120 orang. Selain menjadi partai penguasa, Partai Demokratis Korea menjadi partai pendukung pemerintah. Sedangkan yang menduduki posisi sebagai partai oposisi adalah Partai Masa Depan Bersatu (*United Future Party*) dengan jumlah anggota yang duduk di majelis nasional sebesar 92 orang ([Korean Culture, 2020](#)).

Pada Lembaga yudikatif di Korea Selatan terdiri atas pengadilan tertinggi, pengadilan banding, pengadilan distrik, pengadilan keluarga, pengadilan administratif, dan pengadilan paten ([Korean Culture.org, 2020](#)). Pemimpin pengadilan tertinggi ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan dari majelis nasional. Sedangkan pemimpin ditingkat pengadilan lain ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan Pemimpin pengadilan tertinggi. Masa jabatan pemimpin pengadilan tertinggi adalah enam tahun.

Terkait dengan kebijakan pengendalian Covid-19, interaksi yang intens terjadi antara eksekutif dan legislatif. Presiden Moon, sebagai eksekutif memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk membuat dan menjalankan kebijakan pengendalian Covid-19. Majelis Nasional, sebagai legislatif memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan memberikan dukungan sumber daya dan politik kepada Presiden Moon untuk mengendalikan Covid-19. Selain itu, majelis nasional berperan dalam mengawasi setiap kebijakan Presiden Moon dalam mengendalikan wabah Covid-19.

Kebijakan pengendalian Covid-19 tidak hanya memberikan dampak pada penyebaran Covid-19. Namun, juga memberikan dampak pada tingkat reputasi lembaga eksekutif dan partai-partai dalam majelis nasional. Bagi Presiden Moon, keberhasilan pengendalian Covid-19 dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat ([Sang-Hung, 2020](#)). Selain itu, keberhasilan ini akan berdampak pada meningkatnya reputasi partai pendukung pemerintah yang pada akhirnya meningkatkan elektabilitas. Sedangkan bagi partai oposisi keberhasilan Presiden Moon akan menurunkan reputasi dan elektabilitas.

Pada awal tahun 2020 situasi politik Korea Selatan mulai menghangat karena akan dilangsungkan pemilihan umum legislatif tanggal 15 April 2020. Untuk itu partai pendukung pemerintah dan partai oposisi meningkatkan tensi persaingan guna meningkatkan elektabilitas. Adanya wabah Covid-19 ini memberikan peluang bagi kedua belah pihak untuk meningkatkan elektabilitas.

Posisi awal Presiden Moon dan partai pendukung pemerintah kurang menguntungkan. Kebijakan Presiden Moon sebelumnya belum menghasilkan sesuatu yang signifikan. Salah satunya kebijakan yang bertujuan mengurangi ketegangan dengan Korea Utara. Presiden Moon memang telah berhasil membidani pertemuan antara Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dan Presiden AS, Donald Trump pada tanggal 30 Juni 2019. Presiden Moon sendiri telah bertemu Presiden Korea Utara pada kesempatan yang sama ([Lederman & Nichols, 2019](#)). Namun, rangkaian pertemuan ini dianggap gagal karena tidak membuahkan kebijakan signifikan, terutama kaitannya dengan hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara ([Kelly, 2020](#)). Ketika nantinya Presiden Moon gagal dalam mengendalikan Covid-19, kondisi ini akan memperburuk posisi Presiden Moon dan partai pendukung pemerintah. Prediksi ini merujuk pada proses jatuhnya Presiden Park Geun-hye. Sebelum diberhentikan, Presiden Park telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat Korea Selatan. Mengingat



Presiden Park dianggap tidak cakap dalam menghadapi bencana, termasuk tenggelamnya kapal ferry Sewol yang menelan banyak korban jiwa ([Sang-Hung, 2020](#)).

Pada sisi yang lain, adanya Covid-19 menciptakan peluang bagi partai oposisi untuk mengeksploitasi kebijakan Presiden Moon. Kegagalan Presiden Moon dalam mengendalikan Covid-19 akan dimanfaatkan partai oposisi untuk mendapatkan simpati masyarakat dan meningkatkan elektabilitas. Dengan demikian, peluang untuk menguasai Majelis Nasional akan semakin besar. Langkah politik yang dilakukan partai oposisi adalah meminta Pemerintah Korea Selatan untuk menutup perbatasan dan melarang pendatang dari daratan Tiongkok ([Goh, 2020](#); [Ser Myo-ja, 2020](#)). Tiongkok pada saat itu menjadi episentrum penyebaran Covid-19. Langkah ini diharapkan mampu mencegah masuknya Covid-19 ke Korea Selatan, khususnya dari daratan Tiongkok. Selain itu, partai oposisi juga membuat petisi guna memperoleh dukungan masyarakat untuk meminta Pemerintah Korea Selatan menutup perbatasan dan melarang pendatang dari Tiongkok. Petisi yang dilakukan secara *online* ini telah berhasil mengumpulkan dukungan 760.000 masyarakat Korea Selatan ([Goh, 2020](#)).

Langkah-langkah politik partai oposisi tersebut belum cukup memberikan tekanan kepada Pemerintah Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan tetap membuka perbatasan dan hanya melakukan pengetatan terhadap pendatang dari daratan Tiongkok ([J. H. Park, 2020](#)). Kebijakan Presiden Moon tersebut mendapatkan kritik tajam dari partai oposisi. Mengingat setelah kebijakan ini diberlakukan, Covid-19 masuk ke wilayah Korea Selatan pada tanggal 16 Februari 2020 atau kurang lebih 40 hari sejak kasus pertama ditemukan di Tiongkok. Partai oposisi memandang kebijakan tersebut disebabkan oleh Presiden Moon memiliki rasa takut terhadap Tiongkok, mengingat Tiongkok berkedudukan sebagai rekan dagang dan politik strategis Korea Selatan. Penutupan dan pelarangan pendatang dari Tiongkok, diprediksi akan memperburuk hubungan dengan Tiongkok ([Kelly, 2020](#)). Hal ini kemudian ditegaskan saat Presiden Moon menyatakan bahwa permasalahan Tiongkok adalah permasalahan Korea Selatan juga ([Sang-Hung, 2020](#)).

Partai oposisi juga memandang Presiden Moon terlalu percaya diri dalam menghadapi Covid-19. Buktinya Presiden Moon lebih memilih untuk menjamu sutradara dan pemain film *Parasite* yang berhasil meraih Oscar 2020, dibandingkan berkonsentrasi mengendalikan wabah Covid-19 yang pada saat bersamaan telah mencapai ratusan pasien ([Rich, Eliassen, & Dahmer, 2020](#)). Untuk itu, partai oposisi menganggap Presiden Moon tidak cakap menghadapi krisis ([Sang-Hung, 2020](#)). Atas dasar itu Presiden Moon dituntut untuk meminta maaf kepada masyarakat Korea Selatan ([Goh, 2020](#)). Terakhir, partai oposisi juga menggalang dukungan pemberhentian Presiden Moon melalui petisi. Petisi pemberhentian Presiden Moon telah ditandatangani oleh 1,4 juta orang ([Daminov, 2020](#)).

Langkah oposisi mengkritisi kebijakan Pemerintah mendapatkan simpati masyarakat ([Blatt, 2020](#)). Mengingat pada tanggal 16 Februari 2020, Pemerintah Korea Selatan resmi mengumumkan kasus pertamanya. Selang tidak beberapa lama kemudian, kasus ini kemudian membesar hingga puncaknya pada tanggal 29 Februari 2020. Stigma kegagalan Pemerintah Korea Selatan dalam mengendalikan Covid-19 kemudian menyeruak ke permukaan.

Menurut IDCAA, Presiden Moon memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan mengendalikan Covid-19. Ditambah lagi dukungan dari majelis nasional yang mayoritas diduduki pendukung Presiden Moon. Sebaliknya, partai oposisi memiliki keterbatasan pengaruh di majelis nasional karena proporsi anggota yang lebih kecil dibandingkan dengan partai penguasa pemerintahan. Kebijakan pengendalian wabah Covid-19 tetap menjadi kewenangan Presiden Moon. Presiden Moon cukup yakin dapat menanggulangi wabah



Covid-19. Keyakinan ini didasarkan atas persiapan yang telah dilakukan jauh sebelum wabah Covid-19 datang. Melalui proses pembelajaran yang intensif terhadap wabah SARS dan MERS yang pernah masuk kedalam wilayah Korea Selatan ([Ha, 2016](#)).

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Korea Selatan membuktikan mampu mengendalikan Covid-19. Pemerintah Korea Selatan berhasil menekan jumlah penambahan harian pasien Covid-19 di bawah 50 orang. Selain itu, penemuan penularan dari kluster *Shincheonji Church* juga memberikan dampak yang signifikan. *Shincheonji Church* merupakan organisasi keagamaan yang memiliki banyak pengikut di Korea Selatan. *Shincheonji Church* yang tidak melaporkan pengikutnya yang mengidap Covid-19 kepada Pemerintah. Dampaknya penyebaran Covid-19 dari kelompok *Sincheonji Church* paling besar terjadi di wilayah Korea Selatan. Masyarakat kemudian melihat penularan diakibatkan oleh kluster *Shincheonji Church* bukan disebabkan oleh pendatang dari Tiongkok ([Daminov, 2020](#)).

Walaupun terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan, masyarakat Korea Selatan belum sepenuhnya puas dengan kebijakan Pemerintah Korea Selatan. [Rich et al. \(2020\)](#) melakukan survei terhadap 1.111 masyarakat Korea Selatan untuk melihat respons masyarakat terhadap penanganan Covid-19. Survei dilakukan melalui *web* pada tanggal 2 sampai 12 Maret 2020. Responden diminta untuk merespons pernyataan "*saya puas dengan respon Pemerintah Korea Selatan terhadap wabah Coronavirus*" dengan menggunakan lima pilihan skala likert, dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Secara umum hasil dari survei ini menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan di antara responden. Terdapat 36% responden yang tidak puas terhadap respons Pemerintah Korea Selatan. Sedangkan responden yang menyatakan kepuasannya terhadap respons Pemerintah Korea Selatan adalah 43%.

E. PENUTUP

Penelitian ini membahas konteks kebijakan Pemerintah Korea Selatan dalam mengendalikan Covid-19. Konteks kebijakan diharapkan dapat memberikan penjelasan mengapa kebijakan dipilih, sekaligus memberikan tambahan informasi yang berguna dalam mewujudkan rasionalisasi adopsi kebijakan. Pada penelitian ini konteks kebijakan dijelaskan dengan teori Allison yang digambarkan dalam tiga perspektif, yaitu rasional, organisasional, dan politik.

Pada perspektif rasional, penelitian ini menemukan adanya rasionalitas dalam pembuatan kebijakan. Rasionalitas tersebut ditunjukkan dengan dipilihnya kebijakan yang memberikan manfaat yang besar dengan investasi sumber daya yang minimal. Adanya manfaat terlihat dari keterkaitan secara teoritis dan empiris antara kebijakan dan permasalahan Covid-19. Walaupun disisi lain memberikan implikasi investasi yang besar, nilai investasi tersebut tidak sebanding dengan nyawa warga Korea Selatan yang berhasil diselamatkan melalui kebijakan tersebut.

Pada perspektif organisasional, kebijakan Pemerintah Korea Selatan dipengaruhi oleh aturan dalam organisasi. Secara spesifik keempat kebijakan telah ditentukan dalam IDCAA maupun panduan WHO. Adanya ICAA dan panduan WHO sangat membantu dalam memberikan kepastian kebijakan pengendalian Covid-19. Namun demikian, kedua aturan ini memberikan batasan bagi Pemerintah Korea Selatan melakukan langkah kebijakan lain, misalnya dengan pelarangan perjalanan dari dan menuju wilayah yang menjadi episentrum Covid-19. Pelarangan ini tidak diatur oleh kedua dokumen tersebut.

Pada perspektif politik, kebijakan Pemerintah Korea Selatan juga dipengaruhi oleh faktor politik. Kebijakan pengendalian Covid-19 disebabkan oleh tekanan politik luar negeri



yang dialami Presiden Moon. Presiden Moon harus memilih kebijakan yang mampu mengendalikan Covid-19, sekaligus tetap menjaga hubungan baik dengan negara lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Korea Selatan memilih keempat kebijakan tersebut dan menolak kebijakan lain. Salah satu kebijakan yang ditolak adalah kebijakan pelarangan perjalanan dari dan menuju wilayah yang menjadi episentrum Covid-19 karena kebijakan tersebut dianggap akan merusak hubungan dengan negara lain, padahal kebijakan tersebut memiliki potensi besar dalam mengendalikan Covid-19.

Kebijakan Pemerintah Korea Selatan dipengaruhi oleh konteks organisasional dan politik. Dari perspektif organisasional, penentuan kebijakan pemerintah Korea Selatan dibatasi oleh aturan yang berlaku dalam organisasi. Dari perspektif politik, penentuan kebijakan Pemerintah Korea Selatan dibatasi oleh adanya tekanan politik kepada pembuat kebijakan. Kedua kondisi tersebut menjadi alasan mengapa Pemerintah Korea Selatan cenderung memilih kebijakan untuk pelaksanaan tes, penelusuran, perawatan, dan menjaga jarak fisik dibandingkan kebijakan lain guna mengendalikan Covid-19, walaupun kebijakan lain tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengendalikan Covid-19. Untuk itu, bagi para pihak yang ingin mengadopsi kebijakan Pemerintah Korea Selatan dapat mencari dan memanfaatkan alternatif kebijakan lain, khususnya ketika tidak mengalami batasan organisasional dan politik seperti yang terjadi di Korea Selatan.

Rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah perlunya melihat konteks kebijakan dilihat secara luas. Hanya melihat sebuah kebijakan dari satu perspektif konteks membuat penjelasan akan terbatas. Untuk itu, sebuah kebijakan perlu dilihat dari berbagai konteks, paling tidak dari konteks rasionalitas, organisasional, dan politik sebagaimana dilakukan dalam penelitian ini, sehingga mampu menggambarkan secara jelas mengapa sebuah alternatif kebijakan dipilih dan kebijakan lain ditolak untuk menyelesaikan permasalahan.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Datuk Sri Tahir yang telah memberikan pendanaan berupa Beasiswa IMPACT yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [Al-Tawfiq, J. A., Zumla, A., & Memish, Z. A. \(2014\). Travel Implications of Emerging Coronaviruses: SARS and MERS-CoV. *Travel Medicine and Infectious Disease*, 12\(5\), 422–428. <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2014.06.007>](#)
- [Allison, G. T. \(1969\). Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis. *The American Political Science Review*, 63\(3\), 689–718.](#)
- [Anderson, J. E. \(2003\). *Public Policymaking Fifth Edition*. Texas: Houghton Mifflin Company.](#)
- [Anderson, R. M., Heesterbeek, H., Klinkenberg, D., & Hollingsworth, T. D. \(2020\). How will Country-Based Mitigation Measures Influence the Course of the COVID-19 Epidemic? *The Lancet*, 2019\(20\), 931–934. \[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\\(20\\)30567-5\]\(https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30567-5\)](#)
- [Blatt, M. \(2020\). Coronaviruses is Top Issue in South Korean Election. Retrieved April 29, 2020, from China.org.cn website: \[http://www.china.org.cn/opinion/2020-04/13/content_75924082.htm\]\(http://www.china.org.cn/opinion/2020-04/13/content_75924082.htm\)](#)
- [Bowen, G. A. \(2009\). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9\(2\), 27–40.](#)
- [Channel News Asia. \(2020\). UN Chief Praises South Korea's Simultaneous Fight Against](#)



- COVID-19, Climate Change. Retrieved from <https://www.channelnewsasia.com/news/asia/climate-change-south-korea-new-green-deal-ambitious-12691892>
- Chinazzi, M., Davis, J. T., Ajelli, M., Gioannini, C., Litvinova, M., Merler, S., Vespignani, A. (2020). The Effect of Travel Restrictions on the Spread of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) Outbreak. *Science (New York, N.Y.)*, 9757(March), 1–12. <https://doi.org/10.1126/science.aba9757>
- Cho, H.-W. (2020). Editorial: Effectiveness for the Response to Covid-19: The MERS Outbreak Containment Procedures. *Osong Public Health and Research Perspectives*, 11(1), 1–2.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Third Edition*. California: Sage Publication Inc.
- Daminov, I. (2020). South Korean 2020 Legislative Election: A Mid-Term Test for Moon Jae-In. Retrieved March 30, 2020, from [thediplomat.com](https://thediplomat.com/2020/03/south-korean-2020-legislative-election-a-mid-term-test-for-moon-jae-in/) website: <https://thediplomat.com/2020/03/south-korean-2020-legislative-election-a-mid-term-test-for-moon-jae-in/>
- Dunn, W. N. (2004). *Public Policy Analysis An Introduction*. New Jersey: Paerson Prentice Hall.
- Eisenhardt, K. M., & Zbaracki, M. J. (1992). Strategic Decision Making. *Strategic Management Journal*, 13(2 S), 17–37. <https://doi.org/10.1002/smj.4250130904>
- Everett, K. D., Chadwick, G., Cowan, S. R., & Kinkade, E. (2018). Tobacco Control Policy Adoption Dynamics: A Case Study of Missouri Communities. *Journal of Community Health*, 43(4), 802–809. <https://doi.org/10.1007/s10900-018-0487-z>
- Goh, D.-S. (2020). Korean Right Wing Politicizing Epidemic. Retrieved March 21, 2020, from [asiatimes.com](https://asiatimes.com/2020/03/korean-right-wing-politicizing-epidemic/) website: <https://asiatimes.com/2020/03/korean-right-wing-politicizing-epidemic/>
- Ha, K.-M. (2016). Opinion A Lesson Learned from the MERS Outbreak in South Korea in 2015. *Journal of Hospital Infection*, 92, 232–234. <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2015.10.004>
- Hamilton, I. A. (2020). 11 Countries Are Now Using People’s Phones to Track The Coronavirus Pandemic, and it Heralds a Massive Increase in Surveillance. Retrieved March 25, 2020, from [Business Insider Singapore](https://www.businessinsider.sg/countries-tracking-citizens-phones-coronavirus-2020-3?r=US&IR=T) website: <https://www.businessinsider.sg/countries-tracking-citizens-phones-coronavirus-2020-3?r=US&IR=T>
- He, Z. (2020). What Further Should be Done to Control COVID-19 Outbreaks in Addition to Cases Isolation and Contact Tracing Measures ? *BMC Medicine*, 18(80), 8–10.
- Hellewell, J., Abbott, S., Gimma, A., Bosse, N. I., Jarvis, C. I., Russell, T. W., Eggo, R. M. (2020). Feasibility of Controlling COVID-19 Outbreaks by Isolation of Cases and Contacts. *The Lancet Global Health*, 8(4), e488–e496. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(20\)30074-7](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30074-7)
- Henderson, P. N., Roeseler, A., Moor, G., Clark, H. W., Yazzie, A., Nez, P., Leischow, S. J. (2016). Advancing Smoke-Free Policy Adoption on the Navajo Nation. *Tobacco Control*, 25, i26–i31. <https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2016-053109>
- Huh, K., Shin, H., & Peck, K. R. (2020). Emergent Strategies for the Next Phase of COVID-19. *Infect Chemother*, 52(1), 1–5.
- Jachock, W. W. (2016). Graham T . Allison ’ s Three Dimensions of Decision -Making Revisited : A Case Study of Rice Price Policy in Thailand. *The 5th Burapha University International Conference 2016 “Harmonization of Knowledge towards the Betterment*



- of Society” Graham, 513–529. Chonburi: Burapha University.*
- [Junior, D. B. E. \(2017\). Policy Formation in the Context of Global Governance : Rational Organizational, and Political Perspectives on Policymaking in El Salvador. *International Journal of Educational Development, 21*\(2017\), 81–96. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2016.10.012>](#)
- [Kee, K. F. \(2017\). Adoption and Diffusion. In C. Scott & L. Lewis \(Eds.\), *International Encyclopedia of Organizational Communication*. New Jersey: Wiley-Blackwell.](#)
- [Kelly, R. E. \(2020\). Covid 19 Coronavirus South Korea North Moon China Daegu Restrict. Retrieved March 21, 2020, from Channelnewsasia.com website: <https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/covid-19-coronavirus-south-korea-north-moon-china-daegu-restrict-12475846>](#)
- [Kim, M. S. \(2020\). South Korea is Watching Quarantined Citizens with a Smartphone App. Retrieved March 29, 2020, from technologyreview.com website: <https://www.technologyreview.com/s/615329/coronavirus-south-korea-smartphone-app-quarantine/>](#)
- [Korean Society of Infectious Diseases, Korean Society of Pediatric Infectious Diseases, Korean Society of Epidemiology, Korean Society for Antimicrobial Therapy, Prevention, Korean Society for Healthcare-associated Infection Control and Prevention, & Korea Centers for Disease Control. \(2020\). Report on the Epidemiological Features of Coronavirus Disease 2019 \(COVID-19\) Outbreak in the Republic of Korea from January 19 to March 2, 2020. *J Korean Med Sci, 35*\(10\), 1–11.](#)
- [Korean Culture. \(2020\). Korean Information-Government Constitution. Retrieved March 30, 2020, from Koreanculture.org website: <http://www.koreanculture.org/korea-information-government>](#)
- [Kraft, M. E., & Furlong, S. R. \(2018\). *Public Policy Politics, Analysis, and Alternatives* \(6th ed.\). Singapore: SAGE Publications Inc.](#)
- [Lau, H., Khosrawipour, V., Kochach, P., Mikolajczyk, A., Schubert, J., Bania, J., & Khosrawipour, T. \(2020\). The Positive Impact of Lockdown in Wuhan on Containing the COVID-19 Outbreak in China. *Journal of Travel Medicine, 001*\(714\). <https://doi.org/10.1093/jtm/taaa037>](#)
- [Lederman, J., & Nichols, H. \(2019\). Trump Meets Kim Jong Un, Becomes First Sitting U.S. President to Step into North Korea. Retrieved from <https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-kim-jong-un-meet-dmz-n1025041>](#)
- [Lee, H. Y., Oh, M. N., Park, Y. S., Chu, C., & Son, T. J. \(2013\). Public Health Crisis Preparedness and Response in Korea. *Osong Public Health and Research Perspectives, 4*\(5\), 278–284. <https://doi.org/10.1016/j.phrp.2013.09.008>](#)
- [Lee, V. J., Chiew, C. J., & Khong, W. X. \(2020\). Interrupting Transmission of COVID-19: Lessons from Containment efforts in Singapore. *Journal of Travel Medicine, taaa039*\(February 2019\), 1–13.](#)
- [Lindblom, C. E. \(1959\). The Science of " Muddling Through ". *Public Administration Review, 19*\(2\), 79–88.](#)
- [Marier, P. \(2017\). The Politics of Policy Adoption: a Saga on the Difficulties of Enacting Policy Diffusion or Transfer Across Industrialized Countries. *Policy Sciences, 50*\(3\), 427–448. <https://doi.org/10.1007/s11077-016-9269-6>](#)
- [Milne, G. J., & Xie, S. \(2020\). The Effectiveness of Social Distancing in Mitigating COVID-19 Spread: a modelling analysis. 1–16. *medRxiv*. <https://doi.org/10.1101/2020.03.20.20040055>](#)



- MOHW. (2020). *What is "Social Distancing"*. Retrieved March 29, 2020, from ncov.mohw.go.kr website: <http://ncov.mohw.go.kr/en/shBoardView.do?brdId=12&brdGubun=121&ncvContSeq=1536>
- Moradi, H., & Vaezi, A. (2020). Lessons Learned from Korea: COVID-19 Pandemic. *Infection Control & Hospital Epidemiology*, 1–2. <https://doi.org/10.1017/ice.2020.104>
- Nutt, P. C. (2000). Context, Tactics, and the Examination of Alternatives During Strategic Decision Making. *European Journal of Operational Research*, 124, 159–186.
- Oh, J., Lee, J., Schwarz, D., Ratcliffe, H. L., Jeffrey, F., Hirschhorn, L. R., Ratcliffe, H. L. (2020). National Response to COVID-19 in the Republic of Korea and Lessons Learned for Other Countries National Response to COVID-19 in the Republic of Korea and Lessons Learned. *Health Systems & Reform*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23288604.2020.1753464>
- Park, J. H. (2020). S. Korean Government's Nonsensical Response to Spread of COVID-19. Retrieved April 28, 2020, from [businesskorea.co.kr](http://www.businesskorea.co.kr) website: <http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=42062>
- Park, M. (2017). Infectious Disease-Related Laws: Prevention and Control Measures. *Epidemiology and Health*, 39, 1–10.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2006). Introduction. In B. G. Peters & J. Pierre (Eds.), *Handbook of Public Policy* (pp. 1–10). London: Sage Publication Inc.
- Preiser, W., Zyl, G. Van, & Dramowski, A. (2020). COVID-19: Getting Ahead Of The Epidemic Curve by Early Implementation of Social Distancing. *SAMJ*, 2(March), 30129. <https://doi.org/https://doi.org/10.7196/SAMJ.2020>
- Rees, V. W. (2019). The Promise and Pitfalls of Smoke free Policy Adoption. *Israel Journal of Health Policy Research*, 8(1), 1–3. <https://doi.org/10.1186/s13584-019-0313-9>
- Reuters. (2020). South Korea Reports Fewer than 50 New Infections, Earning WHO Praise. Retrieved from Reuters.com website: <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southkorea-toll/south-korea-reports-fewer-than-50-new-infections-earning-who-praise-idUSKBN21O031>
- Rich, T. S., Eliassen, I., & Dahmer, A. (2020). South Korea: The Politics of Covid-19. Retrieved March 30, 2020, from thediplomat.com website: <https://thediplomat.com/2020/03/south-korea-the-politics-of-covid-19/>
- Sang-Hung, C. (2020). Coronavirus South Korea. Retrieved March 21, 2020, from nytimes.com website: <https://www.nytimes.com/2020/02/27/world/asia/coronavirus-south-korea.html>
- Saw Swee Hock School of Public Health. (2020). *COVID-19 Science Report: Social Distancing & Lockdown*. National University of Singapore. <https://doi.org/10.25540/vcvz-yg51>
- Ser Myo-ja. (2020). Opposition, Public Slam Moon's Response. Retrieved April 28, 2020, from koreajoongangdaily.joins.com website: <http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3074140>
- Shim, E., Tariq, A., Choi, W., Lee, Y., & Chowell, G. (2020). Transmission Potential and Severity of COVID-19 in South Korea. *International Journal of Infectious Diseases*, 5(PG-). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.031>
- The Government of the Republic of Korea. (2020). *Tackling COVID-19*. Development Finance Bureau, Ministry of Economy and Finance.
- The Ministry of Economic and Finance. (2020). *Supplementary Budget to Get Over Covid 19 Outbreak*. Retrieved from



- https://www.singaporebudget.gov.sg/budget_2020/resilience-budget/supplementary-budget-statement.
- Theguardian. (2020). “Do not let this Fire Burn”: WHO Warns Europe over Covid-19. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/european-countries-take-radical-steps-to-combat-coronavirus>
- Trachtman, S. (2020). What Drives Climate Policy Adoption in the U.S. states? *Energy Policy*, 138(January), 111214. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111214>
- UNDP. (2020). Korea’s Rapid Innovations in the Time of COVID-19. Retrieved March 30, 2020, from UNDP.org website: http://www.undp.org/content/seoul_policy_center/en/home/presscenter/articles/2019/korea_s-rapid-innovations-in-the-time-of-covid-19.html
- Vanhoonacker, S., & Wangen, P. (2015). Graham T. Allison, The Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. *The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration*, (March 2015), 0–11. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199646135.013.38>
- Wang, C. J., Ng, C. Y., & Brook, R. H. (2020). Response to COVID-19 in Taiwan: Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing. *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 323(14), 1341–1342. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.3151>
- Wang, Z., He, T., Zhu, L., Sheng, H., Huang, S., & Hu, J. (2020). Active Quarantine Measures are the Primary Means to Reduce the Fatality Rate of COVID-19. *Bull World Health Organ*, 1–12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2471/BLT.20.255844>
- WHO. (2020a). Health Topics. Retrieved March 20, 2020, from www.who.int website: https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
- WHO. (2020b). Novel Coronavirus 2019. Retrieved March 23, 2020, from www.who.int website: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- WHO. (2020c). WHO Director-General’s opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Retrieved March 20, 2020, from www.who.int website: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
- Wilder-Smith, A., Chiew, C. J., & Lee, V. J. (2020). Personal View Can we Contain the COVID-19 Outbreak with the Same Measures as for SARS? *The Lancet Infectious Diseases*, 3099(20). [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30129-8](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30129-8)
- Wood, L. M., Sebar, B., & Vecchio, N. (2020). Application of Rigour and Credibility in Qualitative Document Analysis : Lessons Learnt from a Case Study. *The Qualitative Report*, 25(2), 456–470.
- Worldometers. (2020a). *Corona Testing: Criteria and Number by Country As of March 9, 2020*. Retrieved from <https://www.worldometers.info/coronavirus/covid-19-testing/>
- Worldometers. (2020b). *South Korea*. Retrieved from www.worldometers.info website: <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/south-korea/>
- Wray, S. (2020). South Korea to Step-up Online Coronavirus Tracking. Retrieved March 29, 2020, from smartcitiesworld.net website: <https://www.smartcitiesworld.net/news/news/south-korea-to-step-up-online-coronavirus-tracking-5109>
- Zahariadis, N. (2007). The Multiple Streams Framework: Structure, Limitation, Prospects. In P. A. Sabatier (Ed.), *Theories of the Policy Process*. Westview Press.